

Dr. Abdul Aziz, M. Ag
Akhmad Shodikin, M. H. I
Mohammad Rana, M. H. I



PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR JAWA

Model dan Tipologi Masyarakat Eretan Kulon,
Gebang Mekar, Kluwet dan Pulolampes

Kata Sambutan :
DR. H. Sumanta, M.Ag
(Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR JAWA

Model dan tipologi Masyarakat Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwet dan Pulolampes

Dr. Abdul Aziz, M. Ag

Akhmad Shodikin, M. H. I

Mohammad Rana, M. H. I

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713
Email : chiplukan@yahoo.com

Desain cover & layout : Abu Hasan Mubarak, S.SI

Desain cover & layout : Caswito, M.HI

Percetakan : CV. ELSI PRO

Cetakan Pertama : Januari 2019

136 Halaman

ISBN 978-602-1091-81-4

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Lembar Identitas Penelitian dan Pengesahan | ii |
| Kata Sambutan Rektor | iii |
| Kata Sambutan Ketua LP2M | v |
| Kata Pengantar | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| C. Kajian Teori dan Pustaka | 4 |
| D. Literatur Review | 10 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| BAB II KONDISI MASYARAKAT PESISIRI UTARA JAWA | 15 |
| A. Kondisi Desa Eretan Kulon | 15 |
| B. Kondisi Desa Gebang Mekar | 27 |
| C. Kondisi Desa Kluwut | 29 |
| D. Kondisi Dusun Pulolampes Desa Pulogading | 33 |
| BAB III PEMBERDAYAAN KELUARGA MUSLIM PESISIR | 37 |
| A. Konsep Pemberdayaan | 37 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan | 37 |
| 2. Pemberdayaan Menurut Islam | 38 |
| 3. Tujuan Pembberdayaan | 43 |
| 4. Tahap Pemberdayaan | 43 |
| B. Keluarga Muslim Pesisir | 47 |
| 1. Definisi Keluarga Muslim Pesisir | 47 |
| 2. Karakteristik Keluarga Muslim Pesisir | 49 |
| 3. Sistem Keluarga Muslim Pesisir | 51 |
| 4. Kebudayaan Keluarga Muslim Pesisir | 52 |
| 5. Kehidupan Keagamaan Keluarga Muslim Pesisir | 54 |
| C. Model Pemberdayaan Muslim Pesisir | 55 |
| BAB IV TIPOLOGI DAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UTARA JAWA | 63 |
| A. Tipologi Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes Pulogading | 65 |

| | |
|--|-----|
| B. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Pesisir di Eretan, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading | 75 |
| BAB V EPILOG | 97 |
| A. Simpulan | 97 |
| B. Rekomendasi | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN | 101 |
| Biodata Penulis | 125 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu 17.504 pulau, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dengan kondisi geografi yang demikian, maka wajar apabila tiga perempat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah perairan. Realitas tersebut menjadikan Indonesia memiliki laut dengan sumber daya dan pesisir serta keanekaragaman hayati yang amat besar. Indonesia mempunyai produksi perikanan tangkap tertinggi kedua di dunia pada perairan laut (FAO, 2016). Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km² yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Disamping potensi perikanan tangkap, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki potensi perikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektar.¹

Dengan sumber daya laut yang melimpah tersebut, membuat sebagian masyarakat yang berada di wilayah pesisir memiliki sumber penghasil utama pada subsektor perikanan. Data Podes 2014, menyebutkan bahwa sekitar 21,16 persen desa/kelurahan yang berada pada wilayah pesisir sebagian besar penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. Itupun lebih didominasi oleh perikanan tangkap (18,19 persen) daripada perikanan budidaya (2,97 persen).

Masyarakat pesisir ini pada umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan, yang mana masyarakat nelayan menggantungkan kehidupan ekonominya pada mata pencaharian dengan cara berlayar atau melaut untuk penghasilan pokoknya. Menurut Munir² biasanya dalam mencari penghasilan di laut ada beberapa cara, yaitu: 1) membuat tambak atau pertambakan (petani tambak), dan 2) mencari dilaut lepas atau melaut/nelayan. Kedua cara mata pencaharian hasil laut itu sama-sama hasilnya sangat menguntungkan, dan sama-sama tidak mendapatkan hasil banyak karena faktor cuaca. Berbeda

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2017*, dalam Ebook, v

² Wawancara dengan salah satu warga Pesisir yang bernama Syamsul Munir pada hari Senin, 15 Oktober 2018.

dengan nelayan yang metodenya itu langsung mencari kelaut, dalam proses pencariannya pun masih ada dua cara, yaitu: a) menggunakan garok, dan 2) tradisional atau manual (menggunakan alat seadanya). Jika menggunakan garok mungkin hasilnya akan lebih banyak, namun karena adanya larangan penggunaan sistem garok yang sudah di instruksikan langsung oleh Menteri Kelautan.

Banyaknya masyarakat pesisir yang menjadikan subsektor perikanan sebagai penghasil utama, maka tidak aneh apabila konsepsi masyarakat pesisir sering disematkan dengan profesi nelayan. Walaupun harus diakui, tidak semua masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan. Hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh A. Syatori dalam *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)*, karena secara geografis, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.³

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena ketidak sepehaman pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.⁴

Namun sayangnya dengan potensi yang besar tersebut, kondisi masyarakat pesisir bertolak belakang dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Masyarakat wilayah pesisir hidup dalam garis kemiskinan, hal ini berimbas pula kepada kondisi lingkungannya yang terkesan jauh dari kebersihan, dan juga secara kesadaran pendidikan masyarakatnya masih rendah.

³ A. Syatori dalam tulisan yang berjudul *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)* yang dimuat dalam Jurnal Holistik Volume 15 Nomor 02, 2014 pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 241

⁴ Taufik dalam tulisan yang berjudul *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar* yang dimuat dalam Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari 2013, 61-7

Upaya mengatasi keterbelakangan yang menghiasi masyarakat pesisir baik secara ekonomi, lingkungan, maupun pendidikan merupakan pekerjaan rumah berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah. Hal ini sebagaimana yang tercantum Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.

Berdasarkan amanat undang-undang di atas, bahwa pemerintah berkewajiban mengatasi persoalan yang membelit masyarakat pesisir salah satunya adalah terkait kesejahteraan. Upaya tersebut adalah dengan cara pemberdayaan. Pemberdayaan penting untuk dilakukan dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai objeknya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sudjana dalam bukunya *Ekonomi Rakyat* menyatakan bahwa Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Manusia mempunyai peran sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Pemberdayaan dan pembangunan memiliki hubungan yang erat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kemandirian dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Upaya peningkatan kualitas hidup diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dan lebih cepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan sebagai pembangunan bangsa.⁵

Namun sayangnya, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak membawa perubahan yang berarti. Hal ini terjadi, karena upaya pemberdayaan yang dilakukan cenderung hanya sebatas sesaat dan tidak berkelanjutan. Disamping itu pula tanpa melihat karakter sosiologis masyarakat pesisir disuatu daerah.

⁵ Sudjana, *Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2004, 264

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Eretan Kulon di Indramayu, Gebang di Kabupaten Cirebon, dan Desa Kluwut serta Desa Pulolampes Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Profesi sebagai nelayan merupakan profesi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakatnya. Profesi nelayan sebagai profesi utama yang digeluti oleh kepala keluarga (baca: suami) tentu memiliki resiko, salah satunya adalah dalam segi penghasilan. Penghasilan nelayan yang cenderung tidak menyejahterakan berimbas kepada kehidupan keluarganya yang secara taraf hidup memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Realitas yang ada pada masyarakat empat desa tersebut sebagaimana halnya keluarga yang hidup di daerah pesisir pada umumnya cenderung berada pada garis kemiskinan. Terlebih lagi, keempat desa tersebut hidup pada wilayah yang berbeda-beda, dan secara karakter masyarakat maupun tipologinya juga memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan penting untuk dilakukan pada kedua desa tersebut dengan model yang sesuai. Sehingga upaya pemberdayaan dengan mempertimbangkan karakter maupun tipologi masyarakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga masyarakat pesisir. Karena itu, permasalahan mendasar yang perlu dilihat adalah 1) apa tipologi masyarakat pesisir utara Jawa yang tercermin pada kehidupan keluarga muslim di Desa Eretan Kulon, Gebang, Kluwut dan Pulolampes?, dan 2) bagaimana model pemberdayaan masyarakat pesisir utara Jawa yang difokuskan pada pemberdayaan keluarga muslim di keempat desa tersebut?

B. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

1. Kajian Teori

a) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment*⁶. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya

⁶ Menurut Sumodiningrat, sebagaimana yang dikutip oleh Ambar Teguh, bahwa penggunaan istilah *empowerment* sebagai terjemahan dari pemberdayaan adalah tidak tepat. Menurutnya, istilah memberdayakan adalah memberi “daya” bukan kekuasaan (*power*). Sehingga istilah yang tepat adalah “*energize*” atau dapat dikatakan memberi “energi”. Dengan demikian, pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Lihat, Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, 78-79

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. Kata “berdaya” diartikan sebagai kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatankegiatan yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu atau membuat seseorang layak.⁷

Konsep pemberdayaan pada awalnya muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menepatkan negara terlalu domino dalam melaksanakan pembangunan. Posisi sentral negara terlihat dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Konsep pemberdayaan ini berasumsi bahwa pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat di beri kesempatan atau berhak mengelolah sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.⁸

Dengan demikian, Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.⁹

Terkait pemberdayaan masyarakat pesisir, dalam position paper pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dikutip oleh Michel Sipahelut disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, yakni pembangunan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to *local resource* dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya

⁷ Hasan Alwi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Gaya Media, 2001, 24.

⁸ Manat Rahim, et.al, *Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*, Journal The WINNERS, Vol. 15 No. 1, Maret 2014, 23-33

⁹ Kusnadi, *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2005, 220.

- lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam,
- 2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (fokus atau menitik beratkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi),
 - 3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistik antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas,
 - 4) secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, karena setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan
 - 5) berkelanjutan (keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial).¹⁰

b) Konsep Keluarga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat yang diikat dalam sebuah perkawinan, yang didalamnya terdapat suami, istri, dan anak. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan utama yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan firman Allah, Swt., dalam al-Qur'an Surat al-R m ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Karena keluarga bukan hanya sebagai wadah hubungan suami-isteri, anak-anak dan orang tua, atau anggota keluarga yang lain, tetapi

¹⁰ Michel Sipahelut, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat ...*, 24

juga sebagai mediator hubungan dengan masyarakat serta mendidik, memberi nasihat keteladanan tentang kebaikan dan do'a.¹¹

Menurut M. Quraish Shihab bahwa tujuan utama pernikahan tidak akan dapat diraih apabila fungsi-fungsi keluarga tidak dapat dilaksanakan oleh suami dan istri. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan peendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.¹²

2. Kajian Pustaka

Wilayah pesisir Indonesia adalah satu pusat keanekaragaman biologis laut tropis dunia, yaitu tempat bagi hutan bakau dan terumbu karang serta memiliki potensi sumberdaya lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir serta masyarakat di wilayah lainnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan yang pesat. Berbagai kegiatan dikembangkan di wilayah pesisir.¹³

Dengan realitas tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dalam berbagai sektor, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nendah Kurniasari dan Elly Reswati dalam penelitiannya yang berjudul "Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir" bahwa Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa 82 miliar dolar AS dari laut setiap tahunnya.

Sementara kemampuan sektor kelautan dalam menyumbang PDB nasional sekarang ini masih 92,22 triliun rupiah.¹⁴ Ironisnya, kekayaan laut

¹¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001, 105.

¹² Lihat, M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 124-134

¹³ A. Rosyidie dalam penelitian yang berjudul "Dampak Bencana Terhadap Wilayah Pesisir: Belajar Dari Tsunami Aceh. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 3 Desember 2006

¹⁴ Nendah Kurniasari dan Elly Reswati dalam penelitian yang berjudul "Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir" pada Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 1, 2011.

yang melimpah ruah tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir, yang masih berada dalam garis kemiskinan dan secara ekonomi masih menggantungkan sepenuhnya kepada hasil laut atau berprofesi sebagai nelayan. Menurut Kusnadi, sebagaimana yang dikutip oleh Michel Sipahelut bahwa secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut.¹⁵

Ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah:

- (1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan,
- (2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan,
- (3) Hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh,
- (4) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan,
- (5) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan
- (6) Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi
- (7) Ke masa depan.¹⁶

Sumodiningrat sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Mussadun dan Putri Nurpratiwi, membagi kemiskinan menjadi tiga berdasarkan bentuknya, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya pembangunan sehingga suatu kelompok masyarakat tidak dapat menyelenggarakan pembangunan. Kemiskinan struktural disebabkan oleh ketimpangan struktur masyarakat. Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya suatu kelompok masyarakat.¹⁷

¹⁵ Michel Sipahelut, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat ...*, 24

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mussadun dan Putri Nurpratiwi dalam penelitian yang berjudul "Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok" pada *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 27, no. 1, April 2016

Apabila merujuk kepada pengklasifikasian kemiskinan yang dikemukakan oleh Sumodiningrat di atas, kemiskinan yang di alami oleh masyarakat nelayan adalah kemiskinan natural. Karena secara sumber daya laut yang melimpah ruah, namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia mumpuni, sehingga berdampak kepada tidak termanfaatkannya sumber daya laut tersebut secara maksimal.

Dengan demikian, salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat pesisir adalah dengan mencari model pemberdayaan yang sesuai dengan karakter masyarakat pesisir itu sendiri. Karena, disadari atau tidak, masyarakat pesisir memiliki karakternya tersendiri yang pastinya berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:¹⁸

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

¹⁸ Efrizal Syarief, *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. https://www.bappenas.go.id/files/2113/.../efrizal_20091015122211__2335__0.doc . Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.¹⁹

Untuk itu, kiranya pemberdayaan masyarakat nelayan akan berbeda-beda dalam penangannya. Paling tidak, antara masyarakat nelayan tangkap, bakul, buruh dan tani tambak harus diberdayakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana mereka dapat diberdayakan supaya mereka dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

C. Literatur Review

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak penelitian-penelitian yang dihasilkan sebagai suatu fenomena faktual. Hal ini karena masyarakat pesisir mempunyai sejarah panjang dalam mengisi historical bangsa. Masyarakat pesisir dapat pula disebut sebagai wilayah maritim, sehingga negara kita telah lama disebut sebagai negara maritim. Oleh karena itu wajar jika banyak peneliti yang konsen untuk dijadikan sebagai fokus kajian, misalnya hasil penelitian Siti Arieta tentang *Community Based Tourism Pada Masyarakat Pesisir Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Pemberdayaan Ekonomi*. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir dapat difokuskan pada bagaimana mengelola sektor kepariwisataan di kawasan pesisir sangat memungkinkan dan dapat memajukan pembangunan di lingkungannya²⁰.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dikutip dari tulisan Siti Arieta dalam Jurnal Dinamika Maritim Vol. 2 No. 1 September 2010 pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 72

Demikian pula Taufik dalam penelitian tentang *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar* menyimpulkan bahwa adanya hambatan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir disebabkan karena kurang antusiasme dalam mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan karena dianggap kurang penting dan sulit dipahami serta penyuluhan yang intens dalam rangka pendampingan pembuatan proposal untuk pendanaan merupakan solusi pendampingan yang perlu ditekankan.²¹

Nendah Kurniasari dan Elly Reswati Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan melihat bahwa pemberdaan ekonomi masyarakat pesisir sangatlah kompleks hal ini bukan saja pada aspek teknis di lapangan melainkan secara regulasi dan ini yang penting belum ada keperpihakan, terutama dalam perundang-undangan²².

Demikian pula hasil penelitian Eka Putri Arviyanthi, Margaretha Suryaningsih dan Tri Yuniningsih tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang menyatakan bahwa 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir diupayakan pengembangan kemampuan keterampilan nelayan, 2) Hambatan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah masih ditemui sifat ragu dan kehilangan komitmen, 3) Faktor pendukung adanya komitmen, lingkungan politik yang stabil, perda yang tidak memberatkan, masyarakat yang ingin berubah, ada kelompok yang peduli lingkungan, keterpaduan dengan visi dan misi dinas, dan 4) Faktor kunci keberhasilan adanya koordinasi dan kerjasama²³.

Michel Sipahelut dalam “*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*”, juga menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu 1) strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera adalah sebagai berikut: (1) pengembangan akses permodalan; (2) pengembangan teknologi dan

²¹ Taufik dalam tulisan yang berjudul *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar* yang dimuat dalam Jurnal Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari 2013, pada Universitas Hasanudin, 61-70

²² Dinukil dari Nendah Kurniasari dan Elly Reswati dalam Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No.m 1, 2011

²³ Hasil penelitian kelompok yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang*, oleh Eka Putri Arviyanthi, Margaretha Suryaningsih dan Tri Yuniningsih pada Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>

skala usaha perikanan; (3) pengembangan akses pemasaran; (4) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; (5) pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat; (6) pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan; dan (7) pengembangan diversifikasi pengolahan ikan²⁴.

Ningsih dari Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Republik Indonesia dalam penelitiannya tentang Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir juga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan konsep pendekatan wilayah, yaitu dengan cara menentukan suatu wilayah di kawasan pesisir yang kondisi masyarakatnya miskin, telah terjadi degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, kelebihan tangkap (*over eksploitasi*), penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran. Strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui pendekatan 4 (empat) bina: (1) bina manusia, (2) bina sumberdaya, (3) bina lingkungan, dan (4) bina usaha, yang dirangkaikan dengan metode partisipatoris (*participatory approach*). Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pesisir, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan peringkatnya/ prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; (b) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan (3) konservasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP)²⁵.

Demikian pula Rino Adibowo yang secara khusus meneliti tentang *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir* (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) Pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada umumnya adalah 1) komitmen dari pemerintah dalam

²⁴ Michel Sipahelut dalam tesis yang berjudul *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2010

²⁵ Ningsih dalam penelitiannya tentang “Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, pada Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Republik Indonesia.

mengimplementasikan kebijakan, 2) tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan 3) orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga²⁶.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei yang penekanannya pada bentuk eksploratori (*exploratory*, menjelajah/penjajakan)²⁷. Obyek penelitian adalah keluarga muslim di wilayah pesisir utara Jawa, yaitu di Desa Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer melalui teknik wawancara pada keluarga muslim sebagai responden pada masing-masing obyek, dan data sekunder melalui data-data statistik yang didapatkan pada masing-masing demografi daerah sebagai data penunjang. Sementara jenis data didapatkan dari jenis data kualitatif dan data kuantitatif sekaligus. Dengan demikian, maka teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga analisis kualitatif secara bersamaan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi²⁸.

²⁶ Rino Adibowo dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” pada Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No. 11/Desember 2014 Universitas Komputer Indonesia, Bandung

²⁷ Bentuk penelitian eksploratori ini berhubungan dengan pertanyaan “Apa”, karena untuk menjelajah atau menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, di mana, atau berhubungan dengan karakteristik gejala sosial. Dalam Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 26.

²⁸ Miles dan Huberman (1992) dalam Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 339.



BAB II

KONDISI MASYARAKAT PESISIR UTARA JAWA

A. Kondisi Desa Eretan Kulon

1. Profil Desa Eretan Kulon

a. Kondisi Pemerintahan

Tata pemerintahan Desa Eretan Kulon terdiri dari pemerintah desa dan BPD. BPD sendiri berperan sebagai mitra pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa. BPD yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota ini, salah satu fungsinya adalah untuk membuat rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan. Selain BPD, pemerintah desa juga memiliki mitra dalam menunjang kegiatan pembangunan dan perekonomian desa, mitra tersebut yaitu KUD dan Komite Pemberdayaan Masyarakat.

Koperasi Unit Desa Eretan Kulon yang bernama KUD Mina Bahari berada dalam ranah pemerintah desa dan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah desa. Koperasi tersebut berfungsi untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan melalui simpanan nelayan yang nantinya digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak nelayan dan sebagai tabungan pakeklik. Selain itu, Koperasi Unit Desa juga memberikan sarana untuk kegiatan jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan yang letaknya persis disamping Koperasi Unit Desa.

Mitra pemerintah desa selanjutnya yaitu KPM (Komite Pemberdayaan Masyarakat) yang dibentuk oleh pihak Pertamina. Komite tersebut berfungsi untuk berpartisipasi dalam membangun desa Eretan Kulon, namun kepengurusan Komite Pemberdayaan Masyarakat sendiri diserahkan kepada masyarakat desa Eretan Kulon. Beberapa tugas dari KPM diantaranya yaitu mengurus bantuan-bantuan dari pihak diluar desa (terutama Pertamina) untuk kemudian dikelola sebaik mungkin demi kepentingan warga desa Eretan Kulon. Hingga saat ini, bantuan yang telah diterima dan dikelola oleh KPM dari Pertamina Hulu Energi (PHE) yaitu berupa alat biogas untuk pengelolaan sampah menjadi biogas, bantuan

obat-obatan untuk posyandu, serta bantuan lainnya yang membantu kinerja desa Eretan Kulon dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Eretan Kulon, bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Eretan Kulon, yaitu pembangunan sarana infrastruktur seperti: pembangunan jembatan dan perbaikan jalan.



Gambar 1:

Suasana dan Kondisi Tempat Pelelang Ikan (TPI) Eretan Kulon yang Berfungsi sebagai tempat pelayanan jual beli ikan masyarakat

Selama periode pemerintahan kepala desa terakhir di tahun 2019, Desa Eretan Kulon telah berhasil membuat dua hingga tiga ribu jalan setapak di beberapa blok, membangun rumah komunitas nelayan serta membangun jembatan antar RT. Anggaran pembangunan sendiri berasal dari pusat melalui PNPM, Provinsi, serta Kabupaten yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa.

b. Kondisi Ekonomi

Desa Eretan Kulon merupakan sebuah desa dengan potensi ekonomi utamanya berada di sektor perikanan dan kelautan dengan presentase 60 % dari keseluruhan sumber daya yang ada. Mayoritas penduduk Desa Eretan Kulon berprofesi sebagai nelayan dengan pendapatan yang bervariasi sesuai dengan strata sosial nelayan seperti yang terendah yaitu Anak Buah Kapal (ABK) hingga yang tertinggi yaitu juragan.

Pusat kegiatan perekonomian perikanan berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di samping Koperasi Unit Desa. Tempat Pelelangan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan jual beli

ikan yang baru ditangkap dari laut, TPI di desa Eretan Kulon di pegang oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari sebagai pemberi fasilitas. Kegiatan pelelangan sendiri biasanya berlangsung setiap hari dari pukul 11 pagi sampai selesai tergantung seberapa banyak tangkapan nelayan hari itu, namun biasanya acara lelang ikan selesai pada jam 13.00 WIB..

Berdasarkan hasil observasi Peneliti, terlihat bahwa KUD Mina Bahari memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian nelayan. Selain berperan sebagai penyedia dan pemelihara Tempat Pelelangan Ikan, KUD Mina Bahari juga berperan untuk meningkatkan perekonomian kaum nelayan. Salah satu upaya strategi yang dikembangkan oleh KUD Mina Bahari Desa Eretan Kulon adalah dengan diadakannya tabungan bagi para nelayan, dimana setiap keuntungan yang didapat dari hasil melaut disisihkan untuk ditabung di Koperasi Unit Desa.

Diantara tujuan diadakannya tabungan nelayan oleh KUD Mina Bahari adalah untuk digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak nelayan. Selain untuk biaya pendidikan, tabungan ini bisa diambil saat musim paceklik dimana pada musim tersebut sulit untuk mendapatkan ikan. Jika para nelayan mengalami kecelakaan, disediakan dana asuransi kecelakaan yang di ambil dari tabungan nelayan. Semua hal tersebut di atur oleh *stakeholder* dari KUD Mina Bahari Desa Eretan Kulon dalam rangka meningkatkan perekonomian nelayan.

Berdasarkan data yang didapat dari Koperasi unit Desa pada bulan Mei 2013, di dalam data tersebut dikatakan bahwa produksi ikan oleh para nelayan Eretan Kulon per bulan rata-rata 700-800 ribu kg per bulan dimana angka tersebut adalah angka yang cukup tinggi bagi sebuah desa yang mayoritas penduduknya nelayan. Jenis ikan yang paling sering ditangkap nelayan Eretan Kulon adalah petek dan peperek yang merupakan ikan yang akan diolah menjadi ikan asin kemudian diikuti kuniran, tiga waja, raja gantang, cumi-cumi, dan jenis ikan lainnya. Selain perikanan, terdapat usaha tambak di Desa Eretan Kulon. Komoditi yang dibudidayakan dalam tambak adalah benur, osla, udang, dan ikan lele.

Kegiatan perekonomian warga Desa Eretan Kulon disamping ada yang berprofesi sebagai nelayan, juga ada yang berprofesi sebagai petani, hasil komoditi utama dari pertanian ini berupa padi dimana dalam setahun petani dapat melakukan panen padi sebanyak tiga kali. Kegiatan perekonomian di bidang pertanian ini diatur oleh pemerintah desa yaitu

bagian urusan Raksa Bumi. Selain itu, terdapat pula kegiatan peternakan yang termasuk dalam kegiatan perekonomian Desa Eretan Kulon. Meskipun sebagian besar penduduk Desa Eretan Kulon berprofesi sebagai nelayan, namun adapula profesi lain seperti pengusaha, guru sekolah dan pedagang di Desa Eretan Kulon.

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Kondisi keluarga muslim masyarakat Desa Eretan Kulon Indramayu, jika dilihat dari aspek pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Pendidikan Keluarga Muslim Eretan Kulon

| No | Tingkatan | Orang |
|----|-------------------|-------|
| 1 | Tidak Sekolah | 620 |
| 2 | Putus Sekolah | 60533 |
| 3 | SD/Sederajat | 577 |
| 4 | SMP/Sederajat | 452 |
| 5 | SMA/Sederajat | 442 |
| 6 | Akademi (D1 – D3) | 16 |
| 7 | Sarjana (S1) | 25 |
| 8 | Pascasarjana (S2) | 2 |

Sumber: Profil Desa Eretan (2017)

Desa Eretan Kulon memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar. Mayoritas penduduk di desa Eretan Kulon kini telah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMK. Namun, masih banyak dari para orang tua yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan masih belum menyadari akan manfaat dan urgensi pendidikan.

Siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut (khususnya SMP dan SMK) tidak hanya berasal dari Desa Eretan Kulon, melainkan juga berasal dari beberapa desa

Gambar 2:
Lembaga Pendidikan di Eretan Kulon guna menyediakan tempat anak-anak nelayan



sekitar yang masih berada dalam kecamatan yang sama, seperti dari Desa Eretan Wetan dan Desa Parean Girang. Sebagian penduduk usia pelajar juga banyak yang melanjutkan pendidikan di luar Desa Eretan Kulon.

d. Kondisi Budaya

Di Desa Eretan Kulon terdapat beberapa tradisi atau kebudayaan yang ada dalam masyarakatnya, diantaranya sebagai berikut:

1) Kesenian Dangdutan

Kesenian dangdutan sebagai suatu tradisi yang biasanya laksanakan atau diselenggarakan pada saat ketika para nelayan mendapatkan hasil melimpah. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan untuk hiburan nelayan setelah lama pergi bekerja mencari ikan di laut.

2) Kesenian Nadran

Kesenian ini dilakukan sebagai wujud dari rasa bersyukur atas hasil melimpah yang didapat dari hasil tangkapan para nelayan dilaut. Hal ini merupakan adat yang sudah ada di setiap daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kesenian adran dilakukan dengan cara persembahan kepala kerbau yang nanti akan dibawa dengan perahu rakit yang telah dibuat oleh para nelayan. Mereka melumuri setiap kapal para nelayan dengan darah kerbau, mereka

percaya darah kerbau tersebut membawa keberuntungan untuk pekerjaan mereka sebagai nelayan. Biaya kesenian Nadran ini berasal dari iuran para nelayan yang dikumpulkan setiap hari oleh para nelayan.

3) Pawai obor

Kegiatan ini berupa iring-iringan sambil membawa obor sebagai bentuk rasa kebersyukuran penyambutan datangnya bulan suci ramadhan. Kegiatan pawai obor ini diikuti oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Perjalanan selama pawai obor dimulai dari masjid kemudian mengelilingi desa dan berakhir di masjid yang sama. Selama perjalanan mereka membaca tahlil dan mengumandangkan takbir serta menyerukan marhaban ya ramadhan.

4) Suku dan agama

Sebagian besar warga Desa Eretan Kulon berasal dari suku jawa, sedangkan sisanya merupakan suku pendatang dari suku sunda, Cina, dan Padang. Mayoritas warga desa Eretan Kulon beragama Islam.

5) Bahasa

Warga desa Eretan Kulon sehari-hari banyak menggunakan bahasa Jawa sedangkan untuk lingkungan sekolah maupun tempat formal lainnya mereka menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga tidak jarang yang menggunakan bahasa Jawa (Indramayuan).

e. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Eretan Kulon terdiri dari laki-laki sebanyak 5453 orang dan perempuan sebanyak 5418 orang. Berdasarkan data yang didapat dari monografi desa, diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Eretan Kulon beragama Islam. Di Desa Eretan Kulon terdapat 5 buah masjid, yang mana masjid utamanya adalah Masjid Jamie Eretan Kulon, selain itu juga terdapat 22 buah mushola. Kelompok keagamaan di desa Eretan Kulon terdiri dari 1 kelompok Majelis Ta'lim dan 1 kelompok Remaja Masjid.



Gambar 3:
Salah satu tempat
sarana ibadah
Desa Eretan
Kulon, yaitu
Masjid

Dari hasil observasi selama pemetaan sosial, Peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan di Desa Eretan Kulon sangat antusias tinggi. Masyarakat Desa Eretan Kulon selalu antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan, seperti; peringatan hari besar Islam (PHBI) berupa maulid nabi, hari besar Islam, isra mi'raj dan sebagainya. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak pernah sepi peserta.

f. Kondisi Geografis dan Geologi

Desa Eretan Kulon merupakan desa di kecamatan kandanghaur, Kabupaten Indramayu yang terletak di bagian utara pulau Jawa (jalur pantura) serta memiliki luas wilayah 498,713 Ha. Berdasarkan letak geografisnya, desa Eretan Kulon terletak pada posisi $6^{\circ} 18'52.54''$ S dan $108^{\circ} 02'46.86''$ dengan suhu berkisar $28-31^{\circ}$ C. Desa ini memiliki batas wilayah yaitu:

Tabel 2 Kondisi Batas Desa Eretan Kulon

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Sebelah Utara | : Laut Jawa |
| 2. Sebelah Selatan | : Desa Kertawinangun |
| 3. Sebelah Barat | : Desa Sukahaji |
| 4. Sebelah Timur | : Desa Eretan Wetan |

Gambar 4:
Kondisi batas
Desa Eretan
Kulon



Ketinggian Desa Eretan Kulon sekitar 0.2- 1m dpl. Sebelah utara Desa Eretan Kulon terdapat beberapa hutan mangrove, dengan luas sekitar 30 m2. Sedikitnya hutan mangrove dikarenakan pengalihan fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi lahan tambak dan pemukiman, Melihat kondisi tersebut, kini lahan tambak yang tidak berfungsi mulai ditanami mangrove.

Desa Eretan Kulon merupakan salah satu kawasan pesisir yang terletak di wilayah pantai utara pulau Jawa. Daerah ini masih termasuk pada zona Jakarta yaitu daerah tepi laut Jawa yang terbentang mulai dari Serang ke Cirebon. Sebagian besar daerah ini terdiri dari endapan *alluvial* yang terbawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut Jawa.



Gambar 5:
Muara Tepi Laut
Eretan Kulon

Dari gambar 5 di atas, secara Geomorfologi daerah ini berupa pedataran, yang terdiri dari endapan *alluvial* merupakan hasil dari sedimentasi laut dan darat. Bentuk-bentukan lain dapat ditemukan pada daerah pesisir desa Eretan Kulon, seperti pesisir pantai dan rawa air asin (*salt marsh*) yaitu rawa yang terbentuk akibat genangan air laut di pinggir pantai. Sungai yang berperan dalam proses sedimentasi daerah ini terdapat pada bagian timur wilayah desa ini, dengan tipe sungai *meander* berarus laminar. Sungai dengan tipe ini tingkat pengendapannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat erosinya.

Litologi penyusun wilayah Desa Eretan Kulon ini terdiri dari batupasir, batulempung, dan batulanau. Batuan tersebut masih berupa endapan yang belum terlitifikasikan akibat umur pengendapan yang masih relative muda (kuarter) dan juga struktur geologi yang kurang berkembang pada daerah ini.

Kebencanaan geologi yang sering melanda wilayah desa ini yaitu banjir akibat naiknya permukaan air laut menuju ke daratan (pasang). Untuk menanggulangi keadaan seperti ini masyarakat desa dibantu pemerintah desa membangun sebuah tanggul berupa tumpukan batu setinggi kurang lebih 1 meter yang terpasang di sepanjang garis pantai.

g. Kondisi Sumber Daya Alam

Desa Eretan Kulon memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Hal ini terlihat dari berbagai macam mata pencaharian yang dimiliki oleh warga masyarakatnya.

Gambar 6:

Sungai yang ada di Eretan Kulon sebagai tempat sandar Kapal/Perahu Masyarakat Nelayan. Perahu paling besar bervolume sampai ± 30 GT paling kecil 1 GT



Berdasarkan hasil interview yang dilakukan terhadap Bapak Arif Amin selaku Kepala Desa setempat, Peneliti mendapatkan data atau pemetaan mengenai potensi sumber daya apa saja yang terdapat di desa ini. Oleh karena desa ini terletak di pinggir Pantai Utara Jawa (pantura), maka sebagian besar mata pencaharian warganya adalah sebagai nelayan. Komoditi utama dari desa ini tentunya berasal dari perikanan yang menduduki sekitar 60% dari jumlah seluruh potensi sumber daya alam yang ada. Selain perikanan, ada juga usaha tambak. Komoditi yang dibudidayakan dalam tambak adalah benur, osla, udang, dan ikan lele.

Kemudian, potensi sumber daya alam yang menduduki peringkat kedua adalah hasil dari pertanian. Sekitar 20% dari warga setempat berprofesi sebagai petani. Hasil komoditi utama dari pertanian ini berupa padi dimana dalam setahun petani dapat melakukan panen padi sebanyak tiga kali. Menurut Kades, hasil pertanian di Desa Eretan Kulon tidak begitu maksimal dikarenakan adanya masalah pada irigasi sawah. Selain padi, komoditi lain yang tak kalah banyaknya adalah tanaman kedelai. Kebanyakan warga yang bermata pencaharian sebagai petani ini berdomisili di blok kebon 1. Selain menjadi petani tanaman, beberapa warga juga menjadi petani garam. Garam yang diperoleh dari air laut ini kemudian dijual kembali pada pemasok garam yang bertugas mengubah garam kasar menjadi garam halus untuk kemudian dipasarkan ke daerah Subang. Para petani garam kebanyakan berdomisili di blok kebon 2 Desa Eretan Kulon.

Lalu, sekitar 10% dari potensi sumber daya di desa ini ditempati oleh peternakan. Hewan yang ditenakkan antara lain domba, sapi, dan bebek. Semua peternak yang ada di desa ini kebanyakan berada di blok kebon 1. Kemudian, sisa 10% lagi dari potensi sumber daya yang ada ditempati oleh pengeboran minyak lepas pantai yang dilakukan oleh Pertamina.

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai potensi sumber daya alam apa saja yang terdapat di desa ini maka dapat dikatakan bahwa Desa Eretan Kulon memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam.

h. Aspek Permasalahan Sosial;

Lokasi Desa Eretan Kulon yang terletak di pesisir pantai menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan nelayan yang sebagian besar dihabiskan di tengah laut, membuat mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk dapat hadir di tengah keluarga. Oleh karena itu, kaum perempuan terutama para ibu yang memegang peranan penting sebagai pengganti kepala keluarga di rumah. Kegiatan para ibu selain mengurus kebutuhan rumah tangga seperti memasak, beberapa dari mereka juga membuka usaha lain seperti membuka warung dan pembuatan ikan asin.

Salah satu permasalahan sosial di desa ini adalah mengenai usia pernikahan yang masih sangat muda, yaitu sekitar usia 14-17 tahun. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan tentang pernikahan. Selain itu, terdapat faktor budaya yang menyebabkan kebanyakan masyarakat Desa Eretan Kulon lebih memilih untuk segera melangsungkan pernikahan di usia muda. Masyarakat Desa Eretan Kulon terutama kaum wanitanya berfikir bahwa dengan segera melangsungkan pernikahan maka mereka dapat mengurangi beban keluarga. Faktor pengaruh budaya pergaulan bebas juga membuat masyarakat memilih untuk menikah muda agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Eretan Kulon akan pentingnya pendidikan menjadi permasalahan sosial lain yang kini sedang dihadapi oleh pemerintah Desa Eretan Kulon. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang lebih memilih untuk memprioritaskan pekerjaan sehingga mereka berhenti sekolah lalu bekerja sebagai nelayan atau bagi wanita mereka menikah dan membuat usaha. Selain itu, para orang tua di Desa Eretan Kulon juga masih belum maksimal memotivasi anak-anaknya untuk terus sekolah.

Permasalahan sosial selanjutnya yang tidak luput dari observasi Peneliti adalah tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga lingkungan Desa Eretan Kulon terlihat kurang indah karena banyaknya sampah yang bertebaran di jalanan maupun halaman rumah.

Di samping permasalahan-permasalahan sosial di atas terdapat satu permasalahan sosial yang cukup menarik, yaitu permasalahan tentang

masih terdapat wanita penghibur yang dikenal dengan sebutan ‘dombret’. Meskipun Desa Eretan Kulon merupakan desa yang terbilang religius, tetapi wanita penghibur tersebut seringkali dengan mudah ditemui di acara-acara seperti orkes dangdut maupun acara di kafe.

B. Kondisi Desa Gebang

1. Profil Desa Gebang

Desa Gebang merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Gebang, yang terletak 10 m dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan luas wilayah seluas 224,930 Ha. Desa Gebang terdiri dari 6 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Desa Gebang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gebanguik Kec. Gebang
- Sebelah Timur : Desa Silihasih Kec. Pabedilan
- Sebelah Selatan : Desa Karangwangun Kec. Babakan
- Sebelah Barat : Desa Gebangkulon Kec. Gebang.



Gambar 7:

Peta Lokasi Desa Gebang Mekar

Desa Pemekaran Gebang Kecamatan Gebang

Kondisi geografis Desa Gebang Mekar berada di Ketinggian tanah dari permukaan laut 2 mdpl, Banyaknya curah hujan 2600 mm/tahun, Tofografi

(dataran rendah), Dataran rendah, Suhu udara rata-rata 28° - 32°C dan Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan) :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 35 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten / Propinsi : 250 Km
3. Jarak dari Ibukota Negara : 350 Km

Desa Gebang Mekar merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara \pm 2 mdpl. Sebagian besar wilayah Desa Gebang adalah dataran rendah. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Silih Asih Kec. Pabedilan, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Wangun Kec. Babakan, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gebang Kulon Kec. Gebang, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Gebang Udik Kec. Gebang.

2. Kondisi Desa Gebang Mekar

Dari segi jenis pekerjaan yang paling banyak dilakoni oleh kepala keluarga di Desa Gebang Mekar adalah nelayan, buruh nelayan, dan pedagang. Rinciannya, nelayan sebanyak 668 KK atau 39%, buruh (sebagian besar buruh nelayan dan tani) 504 KK atau 29%, dan 416 KK atau 24% bekerja sebagai pedagang/wiraswasta. Terkait daya beli, terdapat 17% (305 KK) dengan pendapatan di bawah Rp 1 juta, sebanyak 30% memiliki daya beli atau pengeluaran Rp 1,5 juta s/d kurang dari Rp 2 juta, 419 KK atau 24% keluarga dengan rentang pengeluaran Rp 1 juta s/d kurang dari Rp 1,5 juta, dan 297 KK atau 17% keluarga dengan rentang pengeluaran Rp 2 juta s/d kurang dari Rp 2,5 juta. Kondisi ini bisa dianggap bahwa tingkat kesejahteraan 71% warga masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 2.000.000,-/bulan.

Gebang Mekar ini merupakan pemekaran dari Desa Gebang Iilir, dimana posisi atau letak Desa Gebang Mekar kiri jalan raya kalau dari arah Cirebon. Dengan pembatasan sungai besar, Desa Gebang Mekar secara geografis potensial untuk nelayan mencari ikan di laut. Solidaritas masyarakat nelayan cukup solid dalam membantu sesama nelayan. Misalnya, ketika ada kecelakaan di lautan, mereka saling membantu.

3. Aspek Budaya Desa Gebang Mekar

Pada aspek kebudayaan, masyarakat Desa Gebang Mekar memiliki kekayaan budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai muatan pembelajaran. Beberapa sistem kebudayaan yang bisa dimanfaatkan, misalnya: pengetahuan tentang musim, angin, pengetahuan jenis ikan, cara menangkap ikan, alat tangkap dan cara memperbaikinya, perahu dan cara memperbaikinya, serta kuliner kelautan (seperti membuat ikan asin atau ikan asap).

Beberapa kesenian khas dan kegiatan budaya tahunan juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar, seperti: kesenian burok, tarling, topeng, dan wayang. Pada bulan-bulan tertentu mereka mengadakan ritual sedekah laut (nadrans) dan barikan. Biasanya mereka mempersembahkan kepala kerbau untuk dilarung ke laut. Oleh karena itu, program pembelajaran keberaksaraan (KF) yang terkait langsung dengan budaya lokal bisa dikembangkan sebagai muatan pembelajaran.

C. Kondisi Desa Kluwut

1. Profil Desa Kluwut

Kluwut adalah desa di Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di jalan pantura yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Desa Kluwut, salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, merupakan salah satu desa yang dijadikan sebagai pusat aktivitas nelayan.

Desa Kluwut terletak di sebelah barat pusat kecamatan Bulakamba dan dilalui oleh jalur utama Pantai Utara (Pantura). Jika kita melewati jembatan di sebelah barat kantor kelurahan Desa Kluwut, suasana sebagai desa nelayan memang begitu nampak jelas dengan adanya pemandangan melabuhnya ratusan kapal nelayan di sepanjang Sungai Kluwut. Di desa Kluwut ini juga terdapat Pusat Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang cukup besar.

Di Kabupaten Brebes sendiri sebenarnya terdapat beberapa desa nelayan. Namun dari sekian banyak desa nelayan, Kluwut merupakan desa nelayan yang paling besar di wilayah Brebes. Terdapat sekitar 160 kelompok nelayan di Kluwut, dimana setiap kelompok nelayan terdiri dari 5 sampai 10 nelayan dan diketuai oleh seorang nakhoda kapal. Setiap kelompok memiliki satu kapal besar sebagai sarana operasional mencari ikan. Berbeda dengan

desa nelayan Pulogading atau Sawojajar yang hanya terdiri dari nelayan-nelayan kecil dengan perahu-perahu kecil. Umumnya nelayan-nelayan Kluwut merupakan penduduk local, namun ada beberapa nelayan yang berasal dari luar wilayah Brebes seperti Tegal dan Cirebon.

Setidaknya ada dua kelompok masyarakat nelayan di desa ini; yakni kelompok pencari ikan (nelayan) dan kelompok pengolah, penampung sekaligus pemasar (distributor). Dari sekitar 160 kelompok nelayan ada 3 orang yang bertugas untuk mengkordinir (ketua wilayah) beberapa kelompok nelayan. Parkir kapal paling selatan (yang paling dekat dengan jaan raya Pantura) dikordinir oleh Bapak Tasori, paling utara dikoordinir oleh Bapak Sugeng dan di antara tempat parker utara dan selatan (tengah) dikoordinir oleh Bapak Warih. Ketiga pemimpin wilayah ini berada di bawah koordinasi seorang ketua nelayan keseluruhan, yakni Bapak Damir. Biasanya para ketua nelayan ini disebut sebagai *lurah* (lurahnya nelayan). Para nelayan yang tidak melaut biasanya berkumpul di Ranggong, yakni tempat berkumpulnya para nelayan.

Kelompok selanjutnya adalah kelompok pengolah, penampung sekaligus pemasar (distributor). Kelompok ini mempunyai tugas untuk mengolah, menampung dan memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan. Distribusi hasil laut dilakukan ke wilayah Brebes sendiri dan juga ke luar wilayah Brebes. Kelompok ini sangat mudah ditemui, karena biasanya mereka berkumpul di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada tidak jauh dari jalan raya Pantura (sekitar 100 meter utara jalan raya).

2. Kondisi Desa Kluwut

Masih rendahnya perhatian pemerintah dan kesadaran warganya Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes berpotensi jadi desa terkumuh di Kabupaten Brebes. Desa dengan jumlah penduduk 18.600 jiwa terpadat di kecamatan bulakamba dan terpadat Nomor 3 di Kabupaten Brebes belum mempunyai TPA (tempat pembuangan sampah akhir).



Gambar 8:
Kondisi lingkungan Desa Kluwut terkait sampah menjadi permasalahan tersendiri, hampir disudut gang ada sampah yang berserakan

Berdasarkan pantauan observasi, kian hari sampah menumpuk di beberapa TPA liar, yakni di dukuh KARPET (karang sari jepet), karang asem, kemuning, sapu laut, gudang balung dan lecot adalah dukuh paling parah tingkat kekumuhannya atau dengan kata lain sebanyak 13 RW dari 16 RW yang belum tertata baik soal penanganan sampah.

Kepala Desa Kluwut Isa Ansori (41 tahun) saat di hubungi di sela sela kesibukanya di balai Desa Kluwut menuturkan "Pemerintah desa mengalami kesulitan soal pengadaan TPA, karena tanah desa yang harusnya bisa menjadi salah satu solusi TPA jaraknya sangat jauh, lebih 3 km," katanya.

Pihak desa pernah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten agar mendapat fasilitas TPA, akan tetapi di tolak karena lokasinya di bantaran sungai, katanya menyalahi aturan. "inikan bisa jadi dilema". Dia juga mengakui bahwa kesadaran warganya masih rendah dan masih banyak yang hidup di garis kemiskinan. "Tahun kemarin tercatat ada 570 rumah dan sudah di bantu Dinas Kesehatan berupa bantuan pengadaan 100 WC, namun hingga saat ini masih ada 400an rumah tangga yang belum punya WC." Kebanyakan mereka enggan membuat wc sendiri, karena masih ada sungai yang mereka manfaatkan sebagai jamban, kesadaran untuk hidup bersih rendah sekali,".

Bahkan fakta di lapangan tidak sedikit warga yang menutup saluran air, pemukiman semakin padat, banyak pekarangan yang tadinya berfungsi sebagai satu rumah tempat tinggal sekarang di sulap jadi 1 sampai 3 rumah.

pokoknya persoalan di desa Peneliti sangat kompleks.tapi Peneliti sedang mempersuapkan PERDES untuk mengatur semua ini mas.

Gambar 9:

Kondisi jalan/gang masih berserakan sampah dan belum di plur/beton/aspal sehingga ketika musim hujan becek.



Menurut Kades, Ansori, ada lebih 4000 rumah yang ada di desa Kluwut. tiap rumah banyak yang di huni lebih dari 2 KK. Kalau rata rata tiap rumah menghasilkan 5 ons sampah tiap harinya di kalikan 4000 rumah. berarti ada 2 ton tiap hari sampah yang menumpuk di desa, dan 60 ton tiap bulanya, belum lagi limbah pengolahan sampah, limbah bongkar muat kapal ikan, limbah usaha pemitingan ayam. Ini persoalan besar yang sedang terjadi di desa Penelitian.

Salah satu warga Dukuh Karangasem Ridwan (40 tahun) mengaku bahwa warga yang membangun rumah di desa Kluwut banyak yang tidak mempertimbangkan bangunanya terhadap lingkungan sekitarnya. *"gimana nggak kumuh mas, orang mbangun rumah bikin emper ko' di atas got (saluran air, Red.), bahkan gotnya di tutup, padahal dia seorang RT, bagaimana dengan warga biasa yang lain,"* tuturnya. Di tempat yang lain Warso (55 tahun) warga RW 5 juga ikut menyayangkan sebagian perilaku warga yang membuat WC tanpa penampungan (septitenk). *"itu tinja nanti mengalir langsung masuk got dan kali sapi. warga hampir semua membuang sampah di kali sapi (sungai kecil yang melintasi RW 5,6,7 dan 8), itu kondisi kali nya ampun ach,"* tandas warso dengan nada tinggi.

3. Dinamika Masyarakat Nelayan

Sudah menjadi ketentuan alam bahwa kehidupan masyarakat tidak akan pernah lepas dari masalah dan dinamika, begitu juga dengan kelompok masyarakat nelayan ini. Berikut adalah beberapa masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat nelayan desa Kluwut:

- a) Prosedur pembuatan surat kapal (semacam STNK bagi kapal) rumit
Sebagaimana STNK pada kendaraan darat, kendaraan laut juga harus disertai dengan surat-surat identitas. Dan terdapat sekitar 12 surat untuk sebuah kapal yang memiliki masa berlaku yang berbeda-beda sehingga menyulitkan para nelayan untuk beroperasi. Para nelayan berharap, pembuatan dan keberlakuan keduabelas surat itu dapat dilakukan secara bersamaan, sebab keberlakuan yang berbeda membuat kesulitan prosedur dan tentu menghambat operasional kapal dalam mencari ikan.
- b) Pendangkalan sungai Kluwut
Pendangkalan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan belum ada tindakan efektif dari pemerintah. Pendangkalan mengakibatkan sulitnya akses kapal dari sungai (TPI) ke muara (laut), dan mengakibatkan kapal membutuhkan waktu berhari-hari untuk menuju ke laut atau sebaliknya.
- c) Akses penjualan hasil laut ke Tegal yang susah
Pemerintah Kota Tegal enggan menerima masuknya kapal-kapal dari Brebes disebabkan meningkatnya jumlah nelayan local (dari Tegal sendiri). Terkait dengan dinamika kedua, kesulitan akses ke Tegal dan kesulitan akses masuk ke Pusat Pendaratan Ikan di Kluwut karena pendangkalan menjadi masalah serius dan perlu menjadi perhatian.

Masalah alam (seperti cuaca dsb) tidak menjadi masalah berarti bagi para nelayan. Sebab para nelayan sudah sangat paham menghadapi kondisi-kondisi alam yang dapat menghambat proses mencari ikan dan mereka mempunyai trik-trik sendiri dalam menghadapi kondisi alam.

D. Kondisi Desa Pulogading-Pulolampes

1. Kondisi Geografis

Desa Pulogading dusun Pulolampes merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bulakamba Brebes Provinsi Jawa Tengah, adapun kondisi geografis desa tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak Pusat Pemerintahan dengan Desa Pulogading,
 - 1) Jarak Desa Pulogading ke Kecamatan Bulakamba 5,5 Km, dengan lama jarak tempuh ke Kecamatan dengan Kendaraan bermotor 15 menit.
 - 2) Jarak Pulogading ke Kabupaten Brebes 23 Km, dengan lama jarak tempuh ke Kabupaten dengan Kendaraan bermotor 90 menit.
 - 3) Jarak Pulogading Dusun Pulogading ke Ibukota Provinsi yaitu Semarang 212 km, dengan lama jarak tempuh ke Ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor 4 jam 30 menit.
- b. Batas-batas Wilayah Desa Pulogading
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba yang berbatasan dengan Kecamatan Larangan.
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pakijangan Kecamatan Bulakamba berbatasan dengan Kecamatan Wanasari.
 - 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Grinting Kecamatan Bulakamba dengan Kecamatan Tanjung.

c. Data Kependudukan Desa Pulogading

Data Kependudukan Desa Pulogading berdasarkan Jenis Kelamin yaitu :

| Uraian | Laki-Laki | Perempuan |
|-----------------|-------------|-------------|
| Penduduk | 4.317 orang | 4.176 orang |
| Kepala Keluarga | 2.763 | |

2. Pendataan dan Identifikasi Keadaan Masyarakat

a. Kependudukan

Desa Pulogading merupakan desa yang terdiri dari dua pedukuhan yaitu Pulolampes dan Pulogading. Desa Pulogading bisa dikatakan desa yang agamis karena disana masyarakatnya aktif dalam kegiatan keagamaan dan memiliki tempat ibadah yang nyaman untuk digunakan,

seperti kita ketahui jumlah masyarakat Desa pulogading sampai sekarang tercatat berjumlah 8.493 orang dan mayoritas memeluk Agama Islam. Masyarakat disana sangat ramah, kepala Desa dan perangkat desa menerima Peneliti dengan sangat baik, sehingga Peneliti bisa berbaur dengan mereka, dan selama Peneliti melakukan penelitian Peneliti dianggap sebagai bagaian dari masyarakat desa tersebut.

b. Kondisi Pendidikan

Kondisi Pendidikan di desa ini merupakan masalah utama yang Peneliti temui, karena mayoritas pendidikan masyarakat Desa Pulogading adalah lulusan SD. Kebanyakan Masyarakat menganggap bahwa hal yang paling utama adalah bekerja dan menghasilkan uang, serta di dukung oleh kondisi alamnya berupa lautan, jadi kebanyakan masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan dan ABK di luar negeri.

Namun berdasarkan informasi terakhir yang Peneliti dapatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mulai mengarah ke arah yang positif sehingga anak-anak putus sekolah dasar hampir tidak ada. Untuk pendidikan agama sendiri masyarakat disana mulai sadar dan dapat dikatakan sudah bagus terbukti dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai dari TPQ, MD dan majlis taklim. Adapun lembaga pendidikan di desa Polugading yaitu terdapat 3 buah SD/ sederajat, 2 buah TK/PAUD dan 3 lembaga pendidikan berbasis Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI).

c. Kondisi Ekonomi

Hasil analisa penelitian Peneliti bahwa keadaan perekonomian masyarakat Pulogading tergolong sedang jika dilihat dari keadaan daya beli masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kegiatan ekonomi sendiri mayoritas masyarakat disana lebih memilih untuk bekerja diluar daerah bahkan sampai luar negeri, sehingga tidak ada masalah finansial yang dirasakan masyarakat disana. Informasi yang diperoleh dari pihak desa bahwa kegiatan social atau bisa dikatakan zakat mal berjalan dengan lancar, masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi tertolong dengan adanya program tersebut.

d. Bidang Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Pulogading dan khususnya dusun Pulolampes yang mayoritas beragama Islam, selain melaut memiliki banyak agenda kegiatan, seperti pengajian (jamiahan) untuk ibu-ibu, remaja-remaja disana juga memiliki organisasi seperti IRM (Ikatan remaja Masjid). Memang pengajian didominasi oleh jama'ah ibu-ibu.

Masyarakat Dusun Pulampes Desa Pulogading dalam menjalin persaudaraan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya, ketika ada kematian, mereka berbondong-bondong untuk takziah, dan tahlilan bersama. Hal ini hampir ditemui didesa tetangganya, yaitu Desa Grinting. Demikian pula dalam peringatan Hari Besar Islam (PHBI) serta sejenisnya. Tak ketinggalan pula secara sosial kemasyarakatan dalam hal tradisi merayakan sedekah bumi dan sedekah laut setiap tahun di selenggarakan, tepatnya untuk sedekah laut diadakan di bulan November.

3. Potensi Desa Pulogading-Pulolampes

Setiap desa memiliki potensi yang adapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana, selama peneletian Peneliti mengamati potensi-potensi yang dapat dikembangkan diantaranya :

- a. Kegiatan Usaha mandiri yaitu UKM dengan memanfaatkan hasil dari laut yang melimpah yaitu Ikan,
- b. Tingkat kreatifitas masyarakat didesa tersebut sangat bagus, hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya mereka pada saat karnaval atau pesta laut, Peneliti melihat bahwa kreatifitas mereka sangat bagus, jika digali dan dikembangkan lagi bisa menjadi suatu pendapatanb masyarakat yang menjajikan.
- c. Masyarakat disana juga memiliki hewan peliharaan seperti kambing, ayam, angsa, bebek,dan kuda. Jika tata kelolanya maksimal maka hal tersebut bisa menjadi ladang pendapatan yang menjanjikan.
- d. Usaha tambak yang ada dipedukuhan Pulolampes, saat cuaca tidak menentu para nelayan dapat memanfaatkan tambak tersebut sebagai sumber penghasilan lain. Jika dikelola dengan baik penghasilan dari tambak dapat menjadi usaha yang menjanjikan.
- e. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga bisa menjadi potensi yang sangat bagus jika dikembangkan, dimana kegiatan transaksi pembayaran masyarakat seperti penjualan produk atau hasil tangkapan ikan bisa

dilakukan oleh Bumdes, yang keuntungannya akan kembali bagi masyarakat.

Disamping itu, terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) dekat sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan masyarakat pesisir keluarga Muslim mendominasi (100 %), serta pertambakan yang luas. Potensi yang dimiliki masyarakat nelayan keluarga Muslim di Desa Pulogading-Pulolampes disamping banyak yang menjadi nelayan, baik nelayan tangkap, juga nelayan buruh dan petambak. Tetapi juga yang bertani sawah pun tidak sedikit. Artinya, secara ekonomi potensi desa Pulogading-Pulolampes memadai untuk memenuhi kehidupan keluarga yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Badiri, Lili, et. al 2005. *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Badudu dan Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, A. Rifa'i, dan Achmad, Amrullah (Peny.), 1987. *Perspektif Islam dalam Pembanguna Bangsa*. PLP2M, Yogyakarta.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analyiis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumardi, 1984. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Berkah Pustaka.
- Siswijono, Suprih Bambang dan Wisadirana, Darsono, 2008. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Agritek YPN, Malang.
- Sulistiyani, A.T., 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Suhendi, et.all., 2014. *Pemberdayaan Komunitas Pemulung Sampah Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama berbasis Eco-Preneur di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Karangrejo Kota Meteor*. Laporan Penelitian, STAIN Metro.
- Sudjana, 2004. *Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.
- Syatori, A. 2014. *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon*. Diterbitkan pada Jurnal Holistik Volume 15 Nomor 02, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Theresia, Aprillia, et.al., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Taufik, 2013. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. Diterbitkan pada Governmet: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari.

Widjajanti, Kesi, 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Diterbitkan dalam Jurnal
Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.

Hasil Wawancara dengan Surip, Kepala Desa Gebang Mekar.

Hasil Wawancara dengan Ansori, Kepala Desa Kluwut.

Hasil Wawancara dengan Sugeng Supriyadi, Sekretaris Desa Pulogading-
Pulolampes.

Hasil Wawancara dengan Royani Sadra, Serktearis KUD Bahari Desa Eretan Kulon.



Biodata Penulis



Dr. Abdul Aziz, M.Ag

Lengkapnya adalah Abdul Aziz Munawar Albadri, nama bapak adalah Munawar dan kakek Albadri, lahir di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 26 Mei 1973. S 1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN), S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3 di Universitas Borobudur Jakarta. Setelah tamat langsung langsung menjadi Dosen Luar Biasa pada STAIN Cirebon, dan pada 2005 diangkat menjadi Dosen Tetap pada almamater yang sama, meskipun kini (dari 2010) berubah menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai dosen di Program Studi Akuntansi Syariah (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah (Ekos) Program Pascasarjana (S2) tidak menutup diri pada kegiatan sosial keagamaan. Penggagas dan pendiri Rumah Tahfidz al-Qur'an Sulthan Mauna dan Koperasi Kita Khazanah Mandiri (K3M), alumni Pondok Pesantren Al-Faqih Babakan Ciwaringin Cirebon, Tambakberas Jombang dan Kencong Pare Kediri kini diamanti sebagai Wakil Dekan III FSEI dari tahun 2015 – 2019.

Berbagai buku dan karya tulis ilmiah telah dipublikasikan, seperti; *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, *Manajemen Investasi Syariah*, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, *Peran dan Kinerja Koperasi Syariah dalam Memberdayakan Sektor Perdagangan Usaha Kecil* dan sebagainya. Selain menjadi penulis aktif, ia juga di organisasi profesi menjabat ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan ketua bidang pendidikan *Association Of Lectures For Financial And Economic Development* (Alfed). Selain itu, Suami Ratna Mardiani, S.Pd.I dan bapak dari Moh. Ismail Razi al-Faruqi dan Muh. Ramanda Aziz sering mengikuti berbagai diklat dan *training*, salah satunya adalah training auditor internal pada tahun 2008 dan audit mutu internal tahun 2018.



Akhmad Shodiqin, M.H.I

Lahir pada 04 November 1973 di Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Pendidikan formal diawali di MI Tarbiyatul Banin Dukupuntang Cirebon, lulus tahun 1986. Selanjutnya meneruskan sekolah di MTs Al-Ishlah Bobos Cirebon, lulus tahun 1989, dan di MA Al-Ishlah, lulus tahun 1989, selepas MA diterima di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta sekarang) lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Perdata Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Sejak tahun 1998 menjadi Dosen Luar Biasa Pada IAIN Cirebon, dan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Bobos (2005-2010), dan Sejak tahun 2007 diangkat menjadi Dosen Tetap (PNS) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Jurusan Akhwal Syakhsiyah.



Mohamad Rana, M.H.I

Pria kelahiran Cirebon, September tahun 1985 merupakan alumni PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang lulus pada tahun 2014. Saat ini, Suami dari Lily Khalimah, S.Pd dan Babah dari Adzkiya Nur Fatiharurrahmah merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam Jabatan Asisten Ahli. Oleh Dekan FSEI, pria asli Cirebon ini diamanati untuk mengelola Buletin Seikplokedial yang terbit setahun dua kali.

Pengembangan mutu akademik suatu perguruan tinggi harus berasal dari kiprah dan aktivitas dosen dalam mengejawantah ide-ide dan gagasannya yang dituangkan dalam bentuk penelitian dan mempublikasikannya. Ini adalah tugas yang paling pokok dan utama. Karena itu, kualitas dosen akan berdampak pada mutu akademik perguruan tinggi. Fungsi utama dosen adalah 1) melaksanakan pendidikan, 2) penelitian, dan 3) pengabdian kepada masyarakat.

Pertama, melaksanakan pendidikan berarti seorang dosen harus mengajar di kelas melayani mahasiswa dalam proses pembelajaran, untuk *transfer of knowledge* (transfer ilmu pengetahuan) atau menjadi fasilitator dalam kelas, agar kelak menjadi berguna bagi agama, bangsa dan negara. Jadi, dosen harus mampu mengembangkan kompetensi diri meningkatkan ilmu pengetahuan setiap saat.

Kedua, melaksanakan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan seorang dosen agar dalam melaksanakan pengajaran di kelas selalu menginformasikan informasi-informasi yang *up date* atau yang terbaru. Penelitian menjadi penting bagi dosen dikarenakan dalam penelitian akan selalu menemukan jawaban atau *problem solving* dalam suatu permasalahan yang dihadapi. Inilah urgensi penelitian bagi dosen.

Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen dalam bentuk; a) bimbingan kepada mahasiswa saat KKN, b) keterlibatan langsung dosen dalam bimbingan dan penyuluhan. Bentuk non-formal kegiatan dosen di masyarakat ini akan berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap dosen, sehingga berimbas pada almamaternya.